



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Kontra Naratif Kebijakan Pembentukan Danantara untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional Indonesia

Siti Maria Mega Aryanti^{1*}, Margaretha Hanita²

¹Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, m364aryanti@gmail.com

²Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, margaretha.hanita@ui.ac.id

*Corresponding Author: m364aryanti@gmail.com

Abstract: *The establishment of Danantara as Indonesia's Sovereign Wealth Fund (SWF) under the Prabowo-Gibran administration has sparked both public support and criticism. This article analyzes counter-narratives to the policy using the Narrative Policy Analysis (NPA) approach to explore perceptions, concerns, and recommendations regarding Danantara's role in strengthening national economic resilience. This qualitative study draws upon secondary data from national and international online media, which were coded according to four dimensions of economic resilience: macroeconomic stability, market efficiency, good governance, and social development. The findings reveal that the dominant counter-narratives focus on the lack of transparency and accountability in Danantara's governance, leading to public distrust. Conversely, the government's narrative emphasizes the fund's compliance with good corporate governance principles. Through meta-narrative analysis, the study proposes policy development strategies including greater public data accessibility, the creation of an integrity pact, anti-corruption legislation, and enhanced research and governance reform. These efforts aim to ensure that Danantara can operate effectively as a pillar of Indonesia's national economic resilience.*

Keywords: *Danantara, Narrative Policy Analysis, Economic Resilience, Policy Counter-Narrative, Sovereign Wealth Fund*

Abstrak: Pembentukan Danantara sebagai *Sovereign Wealth Fund (SWF)* Indonesia oleh pemerintahan Prabowo-Gibran menuai pro dan kontra di ruang publik. Artikel ini menganalisis kontra narasi kebijakan tersebut dengan pendekatan *Narrative Policy Analysis (NPA)* untuk memahami persepsi, kritik, dan rekomendasi terhadap keberadaan Danantara dalam konteks ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder dari media daring nasional dan internasional, yang dikodekan berdasarkan empat dimensi ketahanan ekonomi: stabilitas makroekonomi, efisiensi pasar, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontra narasi didominasi oleh isu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola, yang menimbulkan ketidakpercayaan publik. Di sisi lain, narasi pemerintah mengklaim bahwa Danantara telah menerapkan prinsip *good corporate governance*. Melalui analisis metanarasi, artikel ini merekomendasikan strategi pengembangan kebijakan berupa peningkatan akses data

publik, pembentukan pakta integritas, regulasi anti-korupsi, serta penguatan riset dan reformasi tata kelola. Dengan demikian, Danantara diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Danantara, *Narrative Policy Analysis*, Ketahanan Ekonomi, Kontra Narasi Kebijakan, *Sovereign Wealth Fund*

PENDAHULUAN

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai Danantara, sebagai *Sovereign Wealth Fund (SWF)* Indonesia merupakan inisiatif strategis pemerintahan baru Prabowo-Gibran dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pembentukan ini secara hukum didasarkan pada Revisi Ketiga Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara secara independen dari APBN dan menginvestasikannya ke dalam proyek-proyek besar yang berkelanjutan, demi mempercepat pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran resmi Danantara pada 24 Februari 2025 telah menimbulkan gejolak di pasar keuangan, apalagi pemerintah memiliki tujuan ambisius dengan mentargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan 8%. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan dilaporkan melemah sebesar 1,55% dibandingkan hari sebelumnya, mencerminkan ketidakpastian pasar terhadap keberadaan dan efektivitas badan ini (Kemenko Perekonomian RI, 2025). Peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Wana Alamsyah dalam media online tempo 25 Februari 2025 menyebutkan bahwa kontroversi semakin menguat akibat peraturan yang menyatakan bahwa Danantara tidak dapat diaudit baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecuali atas permintaan DPR atau dalam audit khusus. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya potensi korupsi dalam pengelolaan aset BUMN yang diserahkan ke Danantara.

Kehadiran tokoh-tokoh kontroversial dalam dewan pengawas seperti Thaksin Shinawatra, selain juga masalah transparansi, turut memperkuat persepsi negatif masyarakat (Narasi.tv, 2025). Masyarakat khawatir bahwa keputusan ini dapat memperburuk kondisi korupsi di Indonesia dan merugikan rakyat. Mereka merasa bahwa kehadiran tokoh-tokoh kontroversial dalam pengawasan BUMN dapat merusak transparansi dan integritas lembaga tersebut. Narasi publik yang berkembang di media sosial seperti tagar #KaburAjaDulu mencerminkan keresahan masyarakat terhadap arah dan implikasi kebijakan ini terhadap kondisi sosial-ekonomi rakyat.

Studi-studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya tata kelolatata kelola SWF yang baik, transparan, serta akuntabel di negara-negara berkembang. Misalnya, penelitian Abbas dan Dompak (2020) dalam Cakranegara (2021) menegaskan bahwa pengelolaan aset strategis negara memerlukan pengawasan yang ketat, karena risiko penyalahgunaan kekuasaan cenderung lebih tinggi di negara dengan tingkat korupsi yang belum terkendali. Demikian pula, Gunawan et al. (2024) menyarankan perlunya penguatan kepercayaan publik melalui pelibatan badan auditor independen. Cholil dan Royhan (2024) juga menekankan perlunya adopsi prinsip tata kelola seperti *Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG)* agar INA dapat menjalankan perannya secara berkelanjutan.

Melihat kompleksitas narasi yang berkembang di berbagai lapisan masyarakat, pendekatan *Narrative Policy Analysis (NPA)* sebagaimana dikembangkan oleh Emery Roe (1994) menjadi sangat relevan. NPA menganalisis bagaimana narasi kebijakan; baik narasi dominan, tandingan, metafora, maupun meta-narasi; membentuk persepsi, konflik, dan

dukungan terhadap suatu kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran terhadap bagaimana narasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil saling bersaing dan berinteraksi dalam membentuk wacana kebijakan pembentukan Danantara.

Pembentukan Danantara berkaitan erat dengan ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Ketahanan ekonomi sendiri didefinisikan sebagai kapasitas perekonomian dalam menahan guncangan dan pulih dengan cepat dari gangguan dalam konteks stabilitas ekonomi global dan bagi Indonesia, menilai ketahanan ekonomi sangat penting mengingat struktur ekonomi negara yang beragam, populasi yang besar, dan kerentanan terhadap guncangan eksternal. (Santoso, 2024). Lahirnya Danantara sendiri diyakini dapat menjadi katalisasi program-program pemerintahan baru lainnya serta dapat membuat peluang kerja baru untuk masyarakat luas. Diharapkan superholding Indonesia tersebut tidak hanya berdampak secara ekonomi namun juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Selain itu, dengan dibentuknya Danantara, publik berharap perekonomian Indonesia semakin resilien terhadap guncangan dimasa mendatang dan bahkan dapat mencapai harapan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.

Penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana narasi-narasi terkait Danantara tersebut berkembang dan berdampak terhadap kepercayaan publik, ketahanan nasional Indonesia, serta keberlanjutan kebijakan pembentukan Danantara tersebut sebagai SWF Indonesia. Penelitian ini bertujuan (a) mengetahui narasi kontra dari berbagai pihak terkait kebijakan pembentukan Danantara untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional Indonesia, (b) membandingkan narasi tersebut dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah ; dan (c) merumuskan rencana strategi pengembangan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menguatkan upaya mendukung ketahanan ekonomi nasional Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori Ketahanan Ekonomi (*Economic Resilient/ER*) yang mengukur ketahanan ekonomi menggunakan empat indikator yaitu stabilitas makroekonomi, tata kelola yang baik, efisiensi pasar mikroekonomi, dan pembangunan sosial (Briguglio et al. 2014, Briguglio 2016). Dalam kajian Bastanifar, (2025), keempat indikator tersebut memiliki 16 sub indikator yang kemudian dijadikan dasar dalam pemilahan data narasi kebijakan pembentukan Danantara. Indikator dan sub indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Komponen Index Ketahanan Ekonomi

No	Dimensi Index	Variabel Dimensi-Sub Index
1	Stabilitas Ekonomi/ <i>Economic Stability</i>	- Inflasi - Pengangguran - Utang Swasta, Pinjaman dan Surat Utang (% GDP) - Utang Bruto Pemerintah (% GDP)
2	Efisiensi Pasar/ <i>Market Efficiency</i>	- Regulasi Bisnis - Regulasi Tenaga Kerja - Regulasi Kredit - Sistem Hukum dan Hak Kepemilikan - Peradilan yang Independen
3	Pembangunan Sosial/ <i>Social Development</i>	- Index Pembangunan Manusia (termasuk SDG's)
4	Tata Kelola yang Baik/ <i>Good Governance</i>	- Kontrol Korupsi - Keefektifan Pemerintahan - Stabilitas Politik, Ketiadaan Kekerasan/ Terorisme - Kualitas Regulator - Aturan Hukum - Partisipasi Warga Negara dan Akuntabilitas

Sumber: Diadopsi dari *Economic Resilient Index Components*, Bustanifar (2025)

METODE

Penelitian ini termasuk kajian retrospektif dalam tataran kebijakan meso yang menganalisis dokumen secara kualitatif berdasarkan kajian dokumen. Analisis data kajian ini menggunakan pendekatan *Narrative Policy Analysis (NPA)* yang difokuskan pada narasi kontra dari berbagai pihak terkait kebijakan pembentukan Danantara untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional Indonesia. NPA adalah sebuah pendekatan analisis kebijakan yang menekankan pentingnya narasi atau narasi dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan publik (Fitri, 2024).

Kajian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari transkrip berita, publikasi, dan berita online yang terkait dengan pembentukan Danantara. Berita-berita terkait penelitian ini diakses dari berbagai situs berita online baik tulis maupun video seperti Tempo, CNBC Indonesia, Vodcast, dll. Penulis mencari berita dengan menghindari transkrip pidato pemerintah dan siaran pers yang diakses dari portal resmi pemerintah agar informasi yang didapat seimbang sesuai dengan keadaan nyata dimasyarakat. Selain itu, penulis memilih berita-berita yang berasal dari sumber serta orang-orang yang memiliki kapasitas kepakaran terkait Danantara seperti ekonom terkemuka, akademisi, sampai dengan investor, dan yang lainnya, untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait permasalahan yang diangkat. Data sekunder tersebut didapat menggunakan pencarian dengan kata kunci “Danantara” dan disertai dengan dimensi dan sub indikator ketahanan Ekonomi dari teori diatas. Pidato, transkrip, dan berita yang digunakan sebagai sumber dibatasi selama periode akhir bulan Februari hingga akhir Mei 2025 atau kurang lebih 100 hari sejak pelaksanaan kebijakan Danantara. Pembatasan ini sejalan dengan apa yang dirujuk oleh para pakar dari *Center of Economic and Law Studies (CELIOS)* (2025) dalam *research report*-nya yang bertajuk “RAPOR 100 HARI PRABOWO-GIBRAN. Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih dan Program Ekonomi, Energi, Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum”, yang menyatakan bahwa 100 hari pertama bukan sekadar angka, melainkan penanda awal untuk mengukur arah kebijakan, keberanian mengambil keputusan strategis, dan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa yang bersifat fundamental.

Tabel 2. Data Penelitian

Tanggal	Judul	Sumber	Url	Narator	Kepakaran	Substansi narasi berdasarkan dimensi ketahanan ekonomi
23-02-2025	DANANTAR A PUTAR DEFISIT JADI UNTUNG 1.400T?	TIKTOK spardaxyz	https://vt.tiktok.com/ZSkjTXpx/	BENNIX	Investor, Pengamat Ekonomi	<i>Economic Stability</i> “utang kita (Indonesia) Jatuh tempo 800 triliun tahun ini”; dst.
25-02-2025	Analisis Percakapan Publik: Danantara	PUBLIKASI	https://pers.dronemprit.id/analisis-is-percakapan-publik-danantar/a/	DRONE EMPRIT	Free Social Media Data Analytics	<i>Good Governance</i> “Proyek ini menjanjikan pertumbuhan ekonomi, tapi kontroversi soal transparansi dan potensi korupsi mulai

							<i>mencuat”, dst.</i>
25-02-2025	Indonesia launches new sovereign wealth fund Danantara, with eye on 8% growth	MEDIA ONLINE INTERNASI ONAL STRAITS TIMES	https://www.straitstime.com/asia/indonesia-launches-new-sovereign-n-wealth-fund-danantar-a-with-eye-on-8-growth	Dr. WIJAYA NTO SAMIRI N	Ekonom Universitas Paramadina , Jakarta	- Good Governance	<i>- Economic Stability “pengalihan APBN Rp 325T ke Danantara...”; dst.</i>
25-02-2025	Ekonom UI: Sistem Pengawasan Danantara Bisa Lebih Transparan Karena Korporat	MEDIA ONLINE NASIONAL tvOneNews	https://www.youtube.com/watch?v=nQh65ywZcIY	- FITHRA FAISAL HASTIA DI - PRITA LAURA	- Ekonom Universitas Indonesia - Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan	- Good Governance	<i>“... perlu kita pahami bahwa tidak melulu adalah soal pemeriksaan korupsi tapi ada pengawas-pengawas lain”; dst kalau ada kerugian..”; dst - Market Efficiency “..perlu untuk membangun pemahaman ini, berarti jadinya nanti resiko bisnis”; dst</i>

01-03-2025	Publik Khawatir Danantara Gagal, Rosan: Kita Tak Bisa Bangun Kepercayaan dalam Semalam ROSI	MEDIA ONLINE NASIONAL KOMPAST V	https://www.youtube.com/watch?v=Akr7JSrMgc	- RAYMO ND CHIN - ROSAN ROESLA NI	- Pendiri Startup Investasi - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Dan Hilirisasi	- Good Governance “.. apakah ini akan dikorupsi, apakah ini ada tindakan pasti bahwa tidak akan korupsi?..”; dst - Market Efficiency “...cara komunikasi yang lebih transparan mungkin sistem ERP (enterprise resource planning) atau teman-teman bisa dibuat semi publik dan bisa diakses oleh publik..”; dst
01-03-2025	Danantara siap Investasi hijau atau sekedar Greenwashing	INSTAGRAM M GreenMoveID	https://www.instagram.com/reel/I/DG5f83PTIJ0/?igsh=MXgzejgwZHhzMG54Mg==	GreenMo veID	Non Profit Organizatio n, Transisi Energi	Social Development “..Indonesia punya 333 GW potensi energi terbarukan yang layak secara finansial dan tersebar di 6 wilayah unggulan..”; dst
03-03-2025	Investor "Was-was" Soal Danantara, Aliran Modal Keluar Tinggalkan RI	MEDIA ONLINE INTERNASI ONAL CNBC INDONESIA	https://www.youtube.com/watch?v=BoYpGAqyK6I	RUDIYA NTO	Direktur Panin Asset Manageme nt	- Economic Stability “...sentimen-sentimen apa yang mungkin bisa membuat keyakinan pasar kembali, ini mungkin menurut saya ya, pertama penurunan suku bunga perlu lebih agresif..”; dst - Market Efficiency “...Pelemahan indeks harga saham gabungan

<i>bahkan menyentuh 3,31%..”, dst</i>						
28-03-2025	Sederet Kontroversi Pengurus Danantara, Rangkap Jabatan hingga Penunjukan Thaksin Shinawatra	MEDIA ONLINE NASIONAL TEMPO	https://www.teempo.co/ekonomi/sederet/	YASSAR AULIA	Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)	Good Governance “.. Saya (presiden Prabowo) akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya, dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia, ...”; dst
07-05-2025	FULL! Ferry Latuhihin: Danantara Dibuat Orang yang Tidak Paham Ekonomi On Point with Adisty #16	KOMPAST V VODCAST	https://www.youtube.com/watch?v=lyUQ1z-0dBw	PROF. FERRY LATUHI HIN, Ph. D	Analis Pasar Modal dan Kebijakan Ekonomi, Mantan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran	- Economic Stability “.. begitu stritex melakukan PHK terhadap lebih dari 10.000 karyawannya Apakah ini benar-benar sudah masuk kedalam badi PHK yang kemudian sedang kita jalani?..”; dst - Market Efficiency “..kaca bisnis, kembali lagi kalau saya ditawarkan satu company yang bangkrut untuk menyelamatkan itu hitung-hitungan saya kan sesimpel cost of fund saya, berapa IR

31-05-2025	BEM ITS Ajak Mahasiswa Diskusikan Danantara Lewat	MEDIA ONLINE ITS ONLINE	https://www.its.ac.id/ne ws/2025/05/31/b	- Dr Ir ARMAN NASUTI ON MEng.	- Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan	saya, berapa internal rate of return saya.. ”; dst - Social Development “..saya pernah usulkan dibangunnya Green Fund, ya kan nah Green fund ini bisa menjadi pemicu bahwa kita punya comperative advantage yaitu sebagai paru-paru dunia ya kan Green fund ini akan membangun suatu ekosistem ya kan development seperti hutan mangrove gambut, ini kan masalah karbon kredit .. ”; dst - Good Governance “..rule of Law yang gelap di Indonesia kasus korupsi yang makin keluar nih kita lihat kemarin juga ada LPEI ya kan ada Pertamina ada PLN lagi sekarang ASD semuanya bertumpuk-tumpuk yang mana ini tidak akan mengundang investor.. ”; dst	- Market Eficiency “..Indonesia perlu menyusun kebijakan yang	

Talkshow	<u>em-its-ajak-mahasis-wa-diskusikan-danantar-a-lewat-talksho w/</u>	- IMAM SUPRIYONO	Kebijakan Publik ITS - Ahli Konsultan	<i>komprehensif dan terstruktur dengan mendorong diplomasi ekonomi global untuk memperkuat produksi dalam negeri.. ”; dst - Social Development “.. acara ini turut mendukung Suistainable Development Goals (SDGs) ke-16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Tangguh.. ”; dst - Good Governance “.. lembaga ini (Danantara) harus menjunjung tinggi nilai-nilai good corporate governance.. ”; dst</i>
----------	--	------------------	---------------------------------------	---

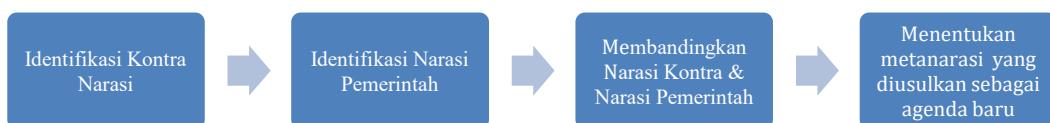
Sumber: Berbagai situs berita online nasional maupun internasional

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data berbasis software NVivo 15. Pada Tahap awal dilakukan pencarian data yaitu transkrip berita online, publikasi, dan berita online yang berkaitan dengan Danantara dengan memperhatikan substansi narasi yang berkaitan dengan dimensi ketahanan ekonomi nasional Indonesia sebagai subjek penelitian. Tahap selanjutnya yaitu reduksi data yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah data melalui pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, serta mengubah data kasar. Pada tahap ini, fitur *Text Search* digunakan untuk menemukan kata atau frasa yang berhubungan dengan dimensi dan sub-dimensi ketahanan ekonomi dari narasi yang menjadi subjek penelitian. Berdasarkan *keyword* dimensi tersebut kemudian dilakukan pengkodean atau *coding*. Dalam tahap *coding*, pernyataan-pernyataan dalam narasi subjek penelitian diberikan kode/label tertentu yang kemudian ditelaah dengan menggunakan fitur analisis berbasis NVivo 15. Pada tahap akhir data-data yang telah direduksi dan dianalisis telah membentuk pola tertentu yang kemudian disajikan peneliti secara deskriptif.

Menurut Shanahan (2018 dalam Fitri, 2024), narasi kebijakan memiliki komponen-komponen yang dapat diidentifikasi dan diuraikan dengan jelas yaitu pengaturan, yang terdiri dari ruang dan waktu; karakter, yang terdiri dari protagonis, antagonis, dan korban; plot, yang terdiri dari pengorganisasian tindakan yang menghubungkan setiap karakter; dan pesan moral sebagai solusi kebijakan. Konten narasi kebijakan terdiri dari sistem kepercayaan atau nilai,

yang dianggap sebagai tujuannya yaitu (*belief system*) dan strategi, yang merupakan cara lain narator untuk memanipulasi atau mengontrol proses kebijakan dalam hal ini yaitu kontra narasi kebijakan pembentukan Danantara untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional Indonesia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang resisten terhadap kebijakan tersebut serta narasi yang dibentuk oleh pemerintah.

Mengacu pada Roe (1994 dalam Fitri, 2024), ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam membentuk metanarasi. Tahapan tersebut dapat dilihat dalam langkah analisis temuan penelitian sebagai berikut:



Sumber: Diadopsi dari Roe (1994 dalam Fitri, 2024)

Gambar 1. Langkah Analisis Temuan Penelitian

Diagram diatas menunjukkan bahwa metanarasi dapat diusulkan sebagai agenda baru apabila narasi isu kontra yang mendominasi telah diidentifikasi dan kemudian dipisahkan dengan narasi pemerintah atau yang berlawanan dengan narasi kontra. Tahap selanjutnya yaitu membandingkan dua set narasi untuk menghasilkan metanaratif melalui perbandingan tersebut. Tahap terakhir yaitu mengidentifikasi cara metanarasi dapat mengubah masalah agar membuat kebijakan dapat mempertimbangkannya dengan lebih baik. Melalui langkah tersebut narasi kebijakan yang berlawanan dengan pembentukan Danantara bisa ditemukan penyeimbang atau solusinya. Metanarasi kebijakan pembentukan Danantara adalah usulan untuk agenda kebijakan baru untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya terkait upaya badan tersebut dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kontra Narasi Kebijakan

Narasi kebijakan pembentukan Danantara yang diluncurkan oleh pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Peluncuran Danantara kemudian diikuti dengan aturan pemerintah berupa UU Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU BUMN tahun 2023, dan PP Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anugrah Nusantara. Melalui kedua peraturan tersebut Danantara lahir sebagai *Sovereign Wealth Fund* Indonesia yang hadir dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Kebijakan kontroversial ini, yang muncul karena mengambil sebagian besar dana BUMN, diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional hingga mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Masyarakat yang belum sepenuhnya mempercayai kekuatan SWF baru tersebut kemudian memunculkan berbagai macam narasi kontra melalui berbagai diskusi maupun berita utamanya di platform digital. Namun demikian, narasi pemerintah juga banyak diluncurkan untuk memberikan edukasi dan menaikkan *public trust* pada isu tersebut.

Tabel 3. Bentuk Narasi

Jenis Analisis	Retrospektif
Level Analisis	Meso: Bagaimana publik membentuk narasi kontra untuk mempengaruhi kebijakan pembentukan <i>Super Holding</i> Danantara, dan juga narasi dari pihak-pihak pemerintah yang mendukung kebijakan tersebut
Latar	Publik merasa resah dengan pembentukan Danantara karena kurangnya

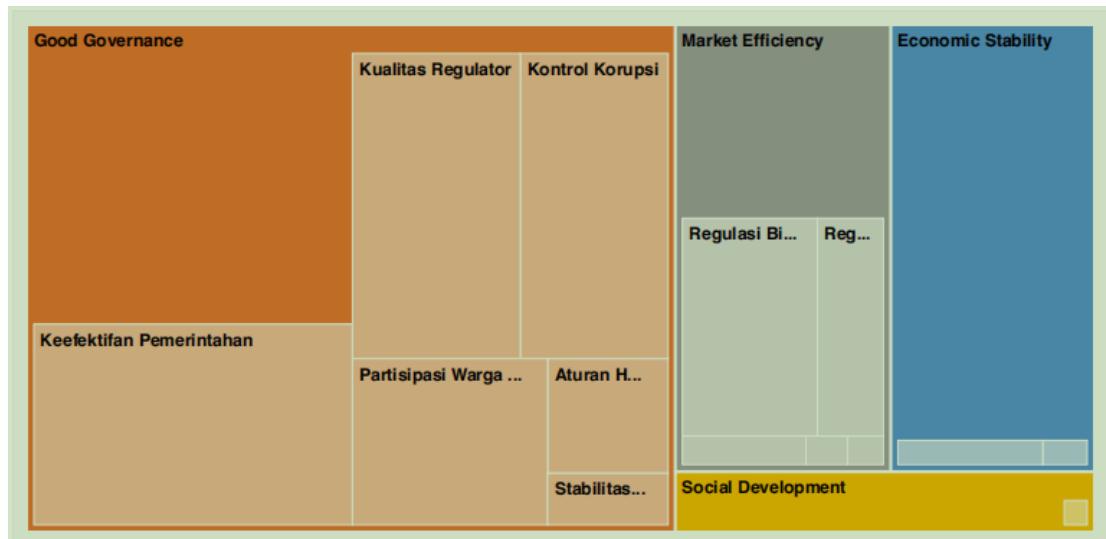
kredibilitas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan badan tersebut yang dianggap dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8%	
Karakter/aktor	Protagonis: Masyarakat/Publik (Analis, Akademisi, Investor, dan masyarakat terkait) Antagonis: Pemerintah dan masyarakat yang pro terhadap kebijakan tersebut Korban: Masyarakat
Plot	<ul style="list-style-type: none">➢ Indonesia ingin mencapai pertumbuhan Ekonomi s.d. 8%.➢ Danantara dianggap sebagai solusi dan katalisator untuk menggerakkan ekonomi serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.➢ Masyarakat menginginkan <i>good governance</i> dan keterbukaan dalam pengelolaan Danantara.➢ Publik banyak yang resisten dengan kebijakan ini.➢ Pemerintah dianggap tidak pro rakyat dan tidak memiliki <i>kontijensi plan</i> apabila kebijakan ini gagal/<i>failed</i>.
<i>Moral of the Story</i>	Masyarakat akan mendukung kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, kehadiran masyarakat dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan tata kelola sehingga <i>public trust</i> akan meningkat dan ketahanan ekonomi dapat menguat.
<i>Belief system narasi kontra</i>	<ul style="list-style-type: none">➢ Agar kepercayaan publik meningkat terhadap kebijakan pembentukan Danantara ini, pemerintah harus memperbaiki tata kelola aturan kebijakan tersebut sehingga lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat baik nasional maupun internasional.➢ Korupsi dan tata kelola pemerintahan yang tidak baik adalah penyebab utama <i>distrust public</i>.➢ Masyarakat berharap kebijakan pembentukan SWF Danantara ini tidak gagal, karena jika hal tersebut terjadi maka ekonomi nasional tidak akan dapat bertahan.
Strategi Narasi Kontra	Masyarakat perlu mendorong pemerintah lebih kuat lagi untuk membuka forum-forum diskusi publik, agar dapat memberikan masukan dalam memperbaiki tata kelola kebijakan ini agar lebih transparan dan akuntabel seperti pembuatan Pakta Integritas “Danantara Tanpa Korupsi”. Harapannya masyarakat semakin percaya terhadap pemerintah (<i>trust building</i>) dalam memperbaiki kebijakan tersebut.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tabel di atas menunjukkan bagian dari bentuk narasi kontra kebijakan pemerintah dan menggambarkan hubungan antar karakter. Awal mula munculnya narasi kontra pembentukan Danantara adalah masyarakat yang resah karena kurangnya kredibilitas badan tersebut yang dianggap dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8% seperti pernyataan ekonom Prof. Feri Latuhihin “menjaga 5% (pertumbuhan ekonomi) bahkan menaikkan ke 5,1 atau ke 5,2 itu sulit sekali. Kenapa kita tuh 6,7 loh 6,8 (8% growth), itu sangat tinggi sekali. Berapa besar investmen yang dibutuhkan untuk mengangkat dari 5% ke 6% aja susah apalagi 8%. Jadi saya bilang gini, masyarakat juga enggak bodoh, untuk Ambisi is fine, tapi angka-angka yang anda lampirkan 8% itu terlalu tidak masuk akal”.

Belief system masyarakat bertujuan agar kebijakan ini dapat lebih transparan dan dapat diandalkan sehingga dapat dipercaya masyarakat baik nasional maupun internasional. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Investor dan CEO Raymond Chin dan mewakili masyarakat terutama kaum muda, yang menyatakan bahwa “Janji (pemerintah untuk tidak korupsi) itu harus disertai dengan aksi-aksi, misalnya kayak public audit atau webinars atau community meetings atau cara komunikasi yang lebih transparan mungkin sistem ERP atau teman-teman bisa dibuat semi publik dan bisa diakses oleh publik. Jadi selain dari janji

ini tidak akan terjadi korupsi ada aksi-aksi yang mendukung dan memastikan warga bahwa lihat aja sendiri gitu misalnya ya enggak perlu lewat DPR, lewatnya publik". Dari pernyataan tersebut, hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah adalah bahwa korupsi dan tata kelola pemerintahan yang tidak baik akan menyebabkan *distrust public*.



Sumber: Diolah oleh Penulis Menggunakan NVivo 15

Gambar 2. Komparasi Frekuensi Narasi Kontra Pembentukan Danantara

Gambar di atas menunjukkan narasi kontra tentang aspek ketahanan ekonomi dalam berita yang dibentuk masyarakat. Dalam kolom ini, jumlah narasi yang bertentangan dengan kebijakan yang berkaitan dengan Danantara disampaikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menggugah kepedulian pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat. Semakin besar kolom berarti lebih banyak narasi yang disampaikan.

Analisis dari data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa narasi yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah mengenai *Good Governance*, yang memiliki kolom lebih dari 50 persen dari keseluruhan data, dan diikuti oleh *Economic Stability* dan *Market Efficiency*, sedangkan *Social Development* memiliki porsi yang sangat kecil dibanding ketiganya. *Good Governance*, dengan *major concerned* pada kefektifan pemerintahan, kualitas regulator, serta kontrol korupsi, mendominasi narasi lain yang memang menjadi perhatian masyarakat dalam *distrust* kebijakan ini. Hal tersebut menggambarkan bahwa tujuan kebijakan Danantara ini cenderung dominan ke arah kurangnya tata kelola yang baik dimana masyarakat menganggap bahwa badan tersebut tidak efektif, kualitas regulator dan kontrol korupsi yang rendah, sehingga menyebabkan badan ini tidak kredibel dan tidak akuntabel. Data ini mengindikasikan bahwa masyarakat menginginkan perbaikan tata kelola, regulator, dan kontrol korupsi dari pemerintah dalam kebijakan pembentukan Danantara. Tiga hal tersebut perlu diwaspada terlebih karena dari data KPK yang diupdate Februari 2025, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada 37% pada akhir tahun 2024, dengan posisi Indonesia berada pada 99 dari 180 negara korup, yang dapat membuat pembentukan Danantara apabila tidak dikelola dengan baik, akan menjadi bumerang bagi negara Indonesia.

Analisis lain yang muncul adalah bahwa narasi mengenai *Social Development* tidak banyak diusung baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Hal ini sangat disayangkan karena *Sosial Development* ini merupakan tujuan utama pembentukan berbagai kebijakan. Pemerintah bisa dikatakan jarang memperhatikan perkembangan sosial, masyarakat bahkan terkadang menjadi korban dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Meskipun menurut BPS pada akhir tahun 2024 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia mencapai 75,02%, namun beberapa

tempat masih ada IPM yang baru mencapai 54,43% yang mengindikasikan ketidakmerataan pembangunan sosial.

Narasi Kebijakan Pemerintah

Narasi kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Danantara mendapatkan sorotan kritis dari berbagai pihak, namun demikian melalui perangkatnya, pemerintah mengerahkan kemampuan diplomasi narasi publiknya agar kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat. Diberbagai platform, pemerintah dan masyarakat yang pro terhadap kebijakan tersebut menjelaskan sisi positif apabila kebijakan ini berhasil dilakukan dengan baik. Semua yang dilakukan oleh pemerintah dan massa yang pro-kebijakan bertujuan untuk memberikan edukasi serta *counter balancing opinion* bagi masyarakat yang kontra terhadap kebijakan sehingga diharapkan kepercayaan mereka tumbuh. Seperti yang dikatakan oleh ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi bahwa “*Danantara bukan cuma sebagai lead investors di sini ya, kita menjadi lebih independen, untuk kemudian sektor mana yang kita invest, tapi kita juga bisa investasi di luar negeri sekarang*”. Lebih jauh dijelaskan oleh Prita Laura, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang mengatakan bahwa “*ini (Danantara) adalah ekosistem akuarium karena Sovereign World Fund ini terikat kepada Santiago Principal yang juga dilakukan, dilaksanakan oleh berbagai Sovereign World Fund di dunia, di sana tentunya ada transparansi ada akuntabilitas dan berbagai prinsipel lainnya yang itu juga kemudian akan menjadi sebuah guidance dan dianut oleh Danantara. Jadi bagaimana prinsipel-prinsipel secara internasional yang memang memastikan bahwa gerak sebuah Sovereign World Fund ini benar-benar transparan, benar-benar Kredibel, berintegritas, itu menjadi satu hal yang dianut oleh danantara*”. Narasi-narasi pro-kebijakan tersebut juga menganggap bahwa kebijakan Danantara ini justru transparan, benar-benar kredibel, berintegritas, karena pengelolaan badan ini berbentuk *good corporate governance*. Hal ini sangat bertolak belakang dengan anggapan kontra narasi.

Analisis Metanarasi

Langkah berikutnya setelah menemukan narasi kebijakan dan kontra narasi, adalah menentukan metanarasi. Menurut Roe (1994, dalam fitri 2024), Analisis metanarasi adalah upaya untuk membuat narasi baru tentang kebijakan yang dapat menggabungkan ide-ide yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

Metanarasi didefinisikan sebagai pendekatan baru yang menghasilkan solusi kreatif atau perjanjian kesepakatan yang memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Metanarasi adalah alternatif untuk intervensi kebijakan dengan strategi untuk mengarahkan kebijakan agar dapat diterima oleh semua pihak jika tidak ditemukan titik tengah untuk kesepakatan antara narasi utama dan kontra narasi.

Tabel 4. Perbandingan Antar Narasi

Kontra Narasi Kebijakan	Narasi Pro-kebijakan	Perbedaan
Kebijakan pembentukan Danantara tidak memiliki <i>good governance</i>	Pembentukan Danantara sangat transparan, kredibel, berintegritas, dan akuntabel	Perbedaan anggapan bahwa Danantara tidak memiliki <i>good governance</i> atau justru transparan kredibel, berintegritas, dan akuntabel

Sumber: Diolah oleh Penulis

Analisis metanarasi, melalui tabel di atas, menunjukkan perbedaan antara narasi yang kontra kebijakan dan narasi yang mendukung kebijakan yang merupakan perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah dimana narasi kontra menyatakan bahwa lembaga ini tidak memiliki *good governance* sedangkan narasi pro-pemerintah justru sebaliknya. Untuk

menyelaraskan perbedaan tersebut, pemerintah perlu membuktikan kepada masyarakat dengan memberikan akses data publik sehingga pemerintah dapat membangun *public trust*. Selain itu, perlunya komunikasi dan sosialisasi Danantara sebagai SWF penopang ketahanan nasional agar lebih ditingkatkan supaya masyarakat semakin yakin dan justru dapat membantu menggerakkan ekonomi nasional.

Strategi Pengembangan Kebijakan

Meskipun pembentukan Danantara memiliki potensi untuk gagal/*failed*, namun SWF Indonesia ini juga memiliki potensi besar juga untuk berhasil dengan berbagai catatan perbaikan kebijakan. Berdasarkan analisis metanarasi di atas, maka ada beberapa celah alternatif pengembangan kebijakan yang dapat dimanfaatkan yaitu:

- a) Pemerintah harus mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan pembentukan Danantara ini dapat mengatasi masalah ekonomi nasional dengan pengelolaan yang lebih transparan dengan memanfaatkan *release data public* yang mudah diakses oleh masyarakat melalui portal-portal pemerintah maupun media komunikasi.
- b) Masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk membuat Pakta Integritas “Danantara Tanpa Korupsi”.
- c) Perlunya dibuat UU perampasan aset bagi pejabat Danantara yang terbukti melakukan korupsi tidak terkecuali untuk Presiden maupun mantan Presiden meskipun kedudukannya sebagai dewan penasehat.
- d) Perlunya dukungan riset dan perbaikan tata kelola kebijakan perlu ditingkatkan untuk memastikan keterbukaan dan keberlangsungan badan ini agar dapat bertahan dari goncangan/*shock* dimasa mendatang.

KESIMPULAN

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Danantara sebagai upaya meningkatkan ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Narasi kontra yang muncul dimasyarakat adalah pembentukan Danantara ini tidak memiliki tata kelola yang baik karena dinggap kurang memiliki kredibilitas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan badan tersebut. Pemerintah disisi lain menganggap bahwa pembentukan Danantara sangat transparan, kredibel, berintegritas, dan akuntabel. Analisis metanarasi menemukan bahwa terdapat sebuah gap antara narasi kontra dengan narasi pro kebijakan sehingga memunculkan strategi-strategi pengembangan kebijakan yaitu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan integritas Danantara terjaga dengan cara *open source data public* yang mudah diakses, pembuatan Pakta Integritas “Danantara Tanpa Korupsi”, pembentukan UU perampasan aset bagi pejabat yang terlibat dalam korupsi serta dukungan riset dan perbaikan tata kelola kebijakan yang harus terus ditingkatkan agar Danantara dapat terus berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh goncangan di masa depan. Dengan demikian, Danantara dapat menjadi lembaga yang efektif dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional Indonesia.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan masukan terhadap peraturan kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Danantara agar tercipta kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, untuk mengantisipasi potensi krisis kepercayaan yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan baik, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat harus bekerja sama. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Danantara dan memperbaiki kebijakan yang tidak optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Danantara dapat terus berperan sebagai penopang ekonomi nasional yang kuat dan stabil.

Future research dari kajian ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan analisis narasi kebijakan dengan pendekatan kuantitatif yang mengukur secara lebih holistik dan empiris

dampak kinerja Danantara terhadap indikator-indikator ketahanan ekonomi sehingga ketahanan ekonomi nasional Indonesia dapat lebih komprehensif.

REFERENSI

- Amril, Rizal. (26 Maret 2025). "Daftar Kasus Kontroversi Thaksin Shinawatra: Koruptor Thailand yang Kini Jabat Dewan Penasihat Danantara". Narasi.tv. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/daftar-kasus-kontroversi-thaksin-shinawatra-koruptor-thailand-yang-kini-jabat-dewan-penasihat-danantara>
- Askar, Media Wahyudi, et. al. (2025). RAPOR 100 HARI PRABOWO-GIBRAN. Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih dan Program Ekonomi, Energi, Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum. CELIOS. Jakarta. <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/01/Rapor-100-Hari-Prabowo-Gibran-Fx-2025.pdf>
- Bastanifar, Iman, dan Shirkhani, Asma. (2025). *A Dynamic Economic Resilience Model: A Case Study of a Regional Integration Organization in Eurasia*. Journal of Economic Integration Vol. 40, No. 1, March 2025, 157-179 <https://doi.org/10.11130/jei.2024044>. <https://www.e-jei.org/journal/view.php?doi=10.11130/jei.2024044>
- BPS. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/15/2296/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2024-mencapai-75-02--meningkat-0-63-poin-atau-0-85-persen-dibandingkan-tahun-sebelumnya-yang-sebesar-74-39-.html>
- Cakranegara, P. A. (2021). Analisa Kebijakan Pembentukan *Sovereign Wealth Fund* di Indonesia. Jurnal Sebatik, 25(1), pp. 1–8. doi: 10.46984/sebatik.v25i1.1261. https://www.researchgate.net/publication/352138972_ANALISA_KEBIJAKAN PEMBENTUKAN SOVEREIGN WEALTH FUND DI INDONESIA
- Cholil, Raihan Radya, dan Akbar S.H., Ll.M, Royhan. (2024). Analisis Komparatif Konsep dan Implementasi Sovereign Wealth Fund: Indonesia Investment Authority Vs Norwegian Government Pension Fund Global. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Financial Times. (2024). *Indonesia launches \$900bn sovereign wealth fund Danantara*. <https://www.ft.com/content/08c7f439-ab24-44d7-ab24-523227fa093e#comments-anchor>
- Fitri, Okta Rina, dan Samputra, Palipi L. (2024). Analisis Naratif Kebijakan Insentif Kendaraan Bermotor Listrik dalam Mengurangi Emisi Karbon. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 9, No. 3, April 2024, p-ISSN: 2541-0849, e-ISSN: 2548-1398. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/15472/9898>
- Gunawan, Florencia Irena; Dini, Alfatika Aunuriella; Sugarda, Paripurna P. (2024). Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore. Yustisia, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 89-116, apr. 2024. ISSN 2549-0907. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/80717>. doi:<http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.80717>
- Handoko, Aloysius Dewanto, et. al. (2025). *Danantara Indonesia and investment policy disorientation*. Edelweiss Applied Science and Technology. ISSN: 2576-8484. Vol. 9, No. 7, 1091-1099 . Publisher: Learning Gate. DOI: 10.55214/25768484.v9i7.8811
- Ichsandi, Muhammad Wildan dan Wilma Silalahi. (2024). Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli Oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10
- I Putu Hedi Sasrawan. (2025). “*Toward Golden Indonesia 2045: Policy Shifts, Governance Challenges, and Future Directions*”. Asian Journal of Economics, Business and

- Accounting 25 (8):412–420. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i81943>
- Koswara, Iwan, dan Rantona, Safutra. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Danantara oleh Media Detik.com. JIPSI : JURNAL ILMU POLITIK DAN KOMUNIKASI. <https://doi.org/10.34010/jipsi.v15i1.16892>
- KPK. (2025). Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>
- M Faiz Muttaqin, Indry, Septiarani, & Rouli Anita, Velentina. (2025). "The Formation of Danantara: Between Efficiency and the Threat of Moral Hazard for State Investments." Walisongo Law Review (Walrev), 7 (1): 67–80. <https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.1.26982>
- Perdana, Radite Panji. (2024). Peran Indonesia Investment Authority (INA) Selaku Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mendukung Program Transisi Energi Di Indonesia. Jurnal Darma Agung, [S.l.], v. 32, n. 6, p. 144 - 158, dec. 2024. ISSN 2654-3915. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/4777>. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.4777>
- Riyandanu, Ameidyo Daud Nasution, Muhamad Fajar (2025-02-26). "Miliarder Ray Dalio Bersama Tony Blair Jadi Dewan Penasihat Danantara - Korporasi Katadata.co.id". <https://katadata.co.id/finansial/korporasi/67beecaed8547/miliarder-ray-dalio-bersama-tony-blair-jadi-dewan-penasihat-danantara>
- Santoso, Feliks Y.E., dan Samputra, Palipi L. (2024). Comparative analysis of Indonesia's economic resilience in the Asia-Pacific context. Journal of Economic Resilience and Sustainable Development. ERSUD 1(2): 131–157. ISSN 3047-0064. <https://journal-iasssf.com/index.php/ERSUD/article/view/1213/797>
- Simanjuntak, Jerry Marmen, dan Widyadhana, Kevin Naufal. (2025). *Danantara, the SOE Superholding, and the Pillar of Indonesia's Economic Future?*. International Journal of Economics Development Research, Volume 6(3), 2025 pp. 1777-1796
- Sinuhaji, Ericko Wiratama. (2023). Pengaturan lembaga pengelola investasi sebagai Sovereign Wealth Fund dan keselarasannya dengan Santiago Principles. Universitas Pelita Harapan. <https://repository.uph.edu/id/eprint/57550/>
- Solihin, D., Arifin, A. L., & Nugroho, J. (2025). DANANTARA: PILAR EKONOMI ATAU BEBAN NEGARA?. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi), 12(1), 225–235. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v12i1.6125>
- Tedjaningtyas, Allika. (2025). Penguatan Economic Resilience Sebagai Upaya Adaptif Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Perlambatan Ekonomi 2025. Journal of Comprehensive Science. p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584 Vol. 4.
- Tempo. (2025). "Serba-serbi Danantara dan Polemiknya: Tak Bisa Diaudit BPK dan KPK". <https://www.tempo.co/ekonomi/serba-serbi-danantara-dan-polemiknya-tak-bisa-diaudit-bpk-dan-kpk-1210303>, <https://www.tempo.co/hukum/danantara-tak-bisa-diaudit-kpk-dan-bpk-ini-penjelasan-prabowo-1211510>
- The Jakarta Post. (2025). "Danantara and the austerity paradox Editorial". <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/02/24/danantara-and-the-austerity-paradox.html>